

Peningkatan Kapasitas RPTRA Meruya Selatan melalui Budidaya Hidroponik: Penghitungan Biaya Produksi dan Harga Jual

¹Yulis Diana Alfia, ²Debbie Yoshida
^{1,2}Akuntansi, Universitas Mercu Buana, Jakarta

E-mail: ¹yulis.diana@mercubuana.ac.id, ²debbieyoshida@mercubuana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) Meruya Selatan. RPTRA merupakan fasilitas berbasis KLA (Kota Layak Anak) yang disediakan Pemerintah DKI Jakarta. KLA mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk menjawab tujuan KLA dan keterbatasan pengelolaan, pendekatan partisipatif diambil dalam musyawarah bersama Pendekatan yang dipakai dalam kegiatan ini adalah ABCD (*Asset-Based Community Development*). Tim pengabdian masyarakat Meruya Selatan melakukan diskusi dan mentabulasi kebutuhan pengembangan RPTRA dalam upaya peningkatan kapasitas fasilitas publik ini, budidaya hidroponik. Ketersediaan sumber daya yang memiliki komitmen pengembangan budidaya dan ketersediaan lahan yang cukup mendorong terjadinya perubahan dan peningkatan kapasitas. Sebagai bagian dari pengelolaan budidaya ini, tim menginisiasi pelatihan ketrampilan keuangan dan biaya, yaitu penghitungan harga pokok produksi dan menentukan harga jual. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan pengelola dalam hal pengelolaan biaya produksi. Pengetahuan dan ketrampilan ini dapat menunjang keberlanjutan program budidaya hidroponik, sehingga RPTRA dapat lebih berdaya dan produktif melalui penyediaan produksi sayuran yang dapat dijual ke masyarakat, lingkungan menjadi lebih asri dan hijau sehingga nyaman untuk digunakan masyarakat, dan dapat memberikan edukasi bagi warga masyarakat terkait budidaya hidroponik.

Kata kunci : *Peningkatan Kapasitas, RPTRA, Hidroponik, ABCD, Biaya Produksi*

ABSTRACT

The objective of this research and community service project is to enhance the capacity of the Meruya Selatan Integrated Child-Friendly Public Space (RPTRA). RPTRA is a facility based on the Child-Friendly City (KLA) concept provided by the Jakarta Provincial Government. KLA implements a child rights-based development system through the integration of government, community, and business commitments and resources in a comprehensive and sustainable manner. To address the objectives of KLA and management limitations, a participatory approach was adopted in joint deliberations. The approach used in this activity is ABCD (*Asset-Based Community Development*). The Meruya Selatan community service team conducted discussions and tabulated the development needs of the RPTRA in an effort to enhance the capacity of this public facility, specifically hydroponic farming. The availability of resources committed to cultivation development and sufficient land availability drives change and capacity enhancement. As part of this cultivation management, the team initiated financial and cost skill training, including calculating production costs and determining selling prices. This aims to enhance managers' capabilities and knowledge in production cost management. This knowledge and skills can support the sustainability of the hydroponic farming program, enabling RPTRA to become more self-reliant and productive through the provision of vegetable production for sale to the community, creating a denser and greener environment that is comfortable for community use, and providing education to residents about hydroponic farming.

Keyword: *Capacity Building, RPTRA, Hydroponic, ABCD, Production Cost*

1. PENDAHULUAN

RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) merupakan salah satu kebijakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberlakukan sejak tahun 2015. Tujuan pembentukan RPTRA adalah untuk mencapai tujuan KLA, yaitu suatu konsep kota layak

anak dengan mengimplementasi kegiatan program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pembentukan RPTRA di berbagai wilayah kota DKI Jakarta menciptakan kesempatan membangun ekosistem sosial kota yang kondusif, namun pada sisi lain terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan secara partisipatif.

Terdapat beberapa permasalahan pengelolaan RPTRA yang dapat menghambat tercapainya tujuan KLA. Salah satu isu utamanya adalah kurangnya perawatan fasilitas RPTRA, terutama sejak pandemic Covid-19, karena pengalihan anggaran. Keberadaan ini membuat fasilitas yang ada tidak terawat dan mengalami kerusakan, beberapa fasilitas bermain rusak dan berkarat serta atap bangunan yang bocor. Secara keseluruhan sekitar 15,4% (265) barang/fasilitas bermain di RPTRA Jakarta dalam kondisi rusak (Agustin & Maulana, 2022). Permasalahan birokrasi dalam pengajuan anggaran untuk perbaikan juga menjadi kendala (Belekubun, 2023). Hal ini menyebabkan beberapa RPTRA belum mendapatkan perbaikan secepat awal dibangun.

Berdasarkan analisis situasi diketahui Kelurahan Meruya Selatan memiliki 5 RPTRA, di antaranya RPTRA Manunggal, Manuver, Menara, Mahkota, dan Meruya Selatan. Di antara ke lima RPTRA tersebut, RPTRA Meruya Selatan merupakan RPTRA yang tertinggal dan kurang berkembang di antara yang lainnya. Pertama, dari segi fasilitas, RPTRA Meruya Selatan sebenarnya memiliki lahan yang cukup luas, terdiri dari lapangan bola, selasar untuk pertemuan warga, ruang kantor, laktasi, dapur, perpustakaan, toilet, lahan untuk penghijauan, taman, dan lokal komposting. Lokal komposting tidak berjalan efektif, lahan penghijauan tidak produktif, kolam ikan yang tidak terawat baik, dan lokal bisnis terbatas untuk penjualan air mineral dan beberapa jenis minuman botol lainnya.

Kedua, dari segi pengelolaan, RPTRA memiliki sumber daya yang terbatas dan masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola dan memajukan RPTRA. Pada saat ini, Pak Lurah Meruya Selatan melakukan rolling SDM dan menempatkan staff pengelola RPTRA Menara ke Meruya Selatan. Tujuannya adalah untuk mengangkat dan memajukan pengelolaan RPTRA.

Permasalahan yang ada di RPTRA Meruya Selatan pada dasarnya secara umum juga ditemukan pada RPTRA lain di Jakarta Barat. Permasalahan ini mempengaruhi optimalisasi fungsi dari tujuan pembentukan RPTRA. Berikut adalah beberapa isu terkait pengelolaan, pertama kehilangan dan kerusakan, yang mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan dan keamanan (Ardiansyah, 2024). Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RPTRA belum berjalan optimal, salah satunya dapat disebabkan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan fungsi RPTRA. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya program-program yang dijalankan serta kurangnya penjagaan dan perawatan akan fasilitas yang ada, misalnya: pengambilan beberapa fasilitas yang ada di RPTRA (Reza & Kurniadi, 2024). Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi jumlah pengelola atau kapasitas pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan, sehingga perlu dilakukan penambahan dan pelatihan SDM (Rakasiwi, 2019). Keempat, masalah pengalihan anggaran dan dampak pandemi, yang berdampak pada ketersediaan perawatan sarana dan prasarana (Reza & Maulana, 2022). Kelima, kurangnya pengawasan dan pemeliharaan, beberapa fasilitas di RPTRA ditemukan tidak terawat, seperti permainan anak yang rusak, kolam ikan yang keruh dan tidak terawat, lahan taman yang tidak terawat dan gersang (Ardiansyah, 2024). Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan, akomodasi dan anggaran pengelolaan yang terbatas.

Beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tentunya akan menghambat optimalisasi fungsi RPTRA sebagai bagian dari tujuan pembentukan KLA. Merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.123 Tahun 2017, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pengelola RPTRA, dan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat, penambahan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan anggaran yang efektif, serta pengawasan dan pemeliharaan rutin dapat membantu memastikan RPTRA berfungsi optimal sebagai ruang publik yang ramah anak. Kampus memegang elemen penting yang dapat memberikan dukungan pemberdayaan dan kemandirian pengelolaan

RPTRA melalui tridharma Perguruan Tinggi. Dukungan yang dapat diberikan dapat berupa peningkatan kapasitas bagi RPTRA dan pengelolaannya.

Diskusi tentang permasalahan dan hambatan pengelolaan RPTRA dilakukan tim bersama dengan perangkat Kelurahan dan pengelola RPTRA. Observasi lokasi dan pencarian solusi dari masalah yang ada memberikan ruang bagi tim pengabdian untuk melakukan peningkatan kapasitas RPTRA, baik terkait fasilitas memiliki guna ekonomi dan pengetahuan. Dengan dukungan sumber daya yang dipasok oleh Pak Lurah ke RPTRA Meruya Selatan diharapkan dapat menjadi motor yang dapat menggerakkan kinerja RPTRA sebagaimana yang diharapkan.

2. LANDASAN TEORI

RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak)

RPTRA adalah tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga masyarakat dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Program Kota Layak Anak (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2017). Dasar kebijakan implementasi RPTRA di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 56 Tahun 2010 tentang pengembangan Kota Layak Anak (KLA) (Netti, 2018). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.123 Tahun 2017, KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Fungsi RPTRA sebagaimana tujuan pembentukan KLA, di antaranya adalah sebagai taman terbuka publik untuk semua usia; tempat bermain dan tumbuh kembang anak; sarana kemitraan berbagai elemen dalam pemenuhan hak anak; ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah; sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan edukasi bagi masyarakat.

RPTRA menempati asset Pemerintah Daerah, dimana secara struktur organisasi pengelolaannya berada dalam 3 (tiga)

tingkatan, di antaranya: tim pembinaan RPTRA Tingkat Provinsi; tim pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi; dan pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan, dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab atas operasional harian. Pengelola RPTRA dipilih melalui proses rekrutmen yang terdiri dari SKPD, TP PKK, dan profesional. Pengelola memiliki tugas untuk menjaga kebersihan, keamanan, serta memastikan program-program berjalan dengan baik. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan, sumber keuangan RPTRA bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Penganggaran dilakukan melalui kelurahan dan SKPD/UKPD terkait (Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2017). Berdasarkan paparan diketahui bahwa visi RPTRA adalah untuk menciptakan ekologi sosial, ekonomi, dan lingkungan di lingkungan tempat tinggal warga, dimana pengelolaannya dapat bersifat partisipatif, antara warga, pemerintah, atau swasta.

Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas adalah pengembangan ketrampilan dan kemampuan dari kapasitas individu atau organisasi agar dapat mencapai tujuan secara lebih efektif (Zururi, 2024). Pemahaman ini dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem tertentu, sehingga terjadi pemaksimalan pencapaian tujuan dan kemampuan komunitas dalam menjawab dan bertahan dalam tantangan (Sukmawani *et al.*, 2023).

RPTRA sebagai fasilitas publik yang diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah melalui sistem dan program yang telah ditentukan secara partisipatif bersama warga, dalam fakta di lapangan dapat menghadapi tantangan dan hambatan (Agustin & Maulana, 2022 dan Belekubun, 2023) yang perlu pemecahan bersama dengan elemen-elemen tertentu, seperti kampus melalui program PKM atau swasta melalui program-program CSR. Ketersediaan fasilitas dan sumber daya merupakan modalitas utama yang perlu dikembangkan potensinya. Di sini menjadi urgensi program dalam menjawab tantangan yang ada melalui peningkatan kapasitas, baik dalam peningkatan fasilitas fisik atau ketrampilan pengelolaan RPTRA.

Hidroponik dan Pengelolaan Keuangan

Hidroponik merupakan salah satu teknik budidaya tanaman yang tepat diimplementasi dalam konsep *urban farming* (Setiany *et al.*, 2023 & 2024). Teknik bertanam yang diterapkan menggunakan media air dengan larutan nutrisi tertentu. Akar tanaman memanfaatkan media tanam alternatif seperti *rockwool*, *cocopeat*, *perlite*, atau kerikil sebagai penopang akar tanaman.

Keunggulan hidroponik dibandingkan pertanian konvensional adalah efisiensi penggunaan air, pengendalian nutrisi yang lebih tepat, serta potensi hasil panen yang lebih tinggi dalam ruang terbatas (Putra & Yulianto, 2015). Karena kelebihan ini, maka hidroponik sangat cocok diterapkan dalam lingkungan urban dengan keterbatasan lahan (Setiany *et al.*, 2023). Dalam konteks perkotaan seperti Jakarta Barat, metode hidroponik menjadi solusi pertanian urban (*urban farming*) untuk mengoptimalkan lahan sempit dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat (Setiany *et al.*, 2024). Kegiatan hidroponik di ruang publik seperti RPTRA dapat menjadi sarana edukasi, rekreasi, serta pemberdayaan ekonomi.

Ketrampilan pertanian perlu ditopang oleh pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi (Gitman & Zutter, 2015). Ketrampilan dasar yang perlu dipahami oleh pengelola dalam budidaya hidroponik adalah penentuan harga pokok produksi dalam menentukan harga jual. Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan perhitungan biaya dalam memproduksi suatu produk tertentu. Pengetahuan tentang penentuan HPP sangat penting dalam menentukan patokan harga jual, sehingga perolehan laba dapat dicapai dengan semestinya (Alfia & Yoshida, 2023). Tujuan dalam pencapaian laba ini agar pengelola dapat secara berkelanjutan memproduksi sayuran hidroponik dan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk pengembangan pengelolaan RPTRA.

3. METODOLOGI

Berdasarkan latar belakang dan paparan dalam landasan teori, dalam menjawab tujuan peningkatan kapasitas pada RPTRA, peneliti

menggunakan pendekatan ABCD (*Asset-Based Community Development*). ABCD merupakan metodologi yang telah banyak digunakan dalam penerapan program pengabdian kepada masyarakat (Alfia *et al.*, 2025; Kurniawan *et al.*, 2024; dan Ramadhani & Saputra, 2022). Metodologi ini berfokus pada kekuatan dan potensi komunitas - bukan pada kekurangan, sebagai asset penting yang harus diorganisasi menjadi faktor modal bagi komunitas sehingga dapat berdaya guna secara lebih maksimal untuk mencapai tujuan komunitas (Alfia *et al.*, 2025).

RPTRA memiliki asset (potensi) yang dapat dikembangkan kapasitasnya, antara lain: *asset tangible*, seperti ketersediaan lahan dan sumber daya manusia sebagai pengelola. *Asset intangible*, seperti dasar hukum pengelolaan yang jelas, potensi pasar, dan dukungan masyarakat sebagai pengguna fasilitas. Pemaksimalan fungsi lahan, pembenahan tata ruang dalam lingkungan RPTRA, dan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan pengelolaan merupakan fokus utama yang ingin dicapai oleh program melalui ABCD.

Terdapat 3 (tiga) tahapan metode yang dilaksanakan dalam program ini (Zunaidi, 2024). Berdasarkan ABCD tahapan ini memnuhi kaidah-kaidah tertentu, antara lain: *perencanaan*, terdiri dari kegiatan pengenalan dan sosialisasi program, pemetaan asset, analisis ekonomi, dan perencanaan aksi. Kegiatan dilakukan dengan presentasi dan diskusi kelompok. *Outcome* dari tahapan ini adalah analisis situasi, pemetaan asset dan potensi, analisis ekonomi, dan desain aksi. Tahapan kedua adalah *pelaksanaan*, terdiri dari kegiatan penyediaan media tanam dan instalasi media hidroponik; pelatihan dan praktik hidroponik, di antaranya: pembibitan, perawatan, pemanenan, pengemasan produk; dan pelatihan pengelolaan keuangan (biaya produksi). *Outcome* dari kegiatan ini adalah produk sayuran hidroponik dan kemampuan menentukan biaya produksi dan harga jual. Tahapan ketiga adalah *evaluasi*, terdiri dari kegiatan pengisian kuesioner oleh peserta dan monitoring berkala. *Outcome* dari tahapan ini adalah data evaluasi dan catatan progress dan perubahan produktifitas dan lingkungan.

Terdapat beberapa elemen *stakeholder* dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini, antara lain: Kelurahan, pengelola RPTRA, masyarakat, dan kampus. PAR (*Participatory Action Research*) sebagai

basis ABCD menuntut keterlibatan mitra dalam peningkatan kapasitas yang diharapkan (Suwendi *et al.*, 2022). Kelurahan merupakan fasilitator utama yang menjembatani tim peneliti dalam melakukan diskusi dengan mitra RPTRA untuk memetakan permasalahan dan pemecahannya. Pengelola RPTRA merupakan mitra yang akan melakukan pengembangan budidaya sayuran hidroponik, perawatan pada fasilitas yang disediakan, serta pengelolaan RPTRA secara lebih baik melalui wirausaha budidaya hidroponik. Masyarakat pengguna RPTRA ikut serta dalam kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengetahuan tentang budidaya hidroponik. Keikutsertaan warga dalam kegiatan pelatihan ini adalah bahwa sebagai masyarakat pengguna manfaat RPTRA harus memiliki pengetahuan untuk ikut menjaga keberlanjutan fasilitas publik yang ada di lingkungannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian metodologi, maka hasil dipaparkan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian hasil dianalisis sebagaimana metodologi yang digunakan. Dalam ABCD memuat lima komponen, yaitu *discover*, *dream*, *design*, *define/deliver*, dan *destiny* (Mathie & Cunningham, 2002). *Discover*, *dream*, dan *design* harus dapat dijelaskan dalam tahapan perencanaan. Analisis mencakup bahasan apakah asset dan potensi komunitas telah diidentifikasi dengan baik (*discover*), apakah visi bersama benar dirumuskan berdasarkan diskusi kelompok yang melibatkan para *stakeholder* (*dream*), dan apakah perencanaan aksi telah ditentukan berdasarkan potensi dan visi yang ingin dicapai (*design*). *Define/deliver* memuat pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan dan disepakati bersama oleh *stakeholder*. Dalam tahap evaluasi harus dapat dijelaskan tentang analisis keberlanjutan program (*destiny*).

Perencanaan

Komponen *outcome* dalam tahap perencanaan adalah meliputi: analisis situasi, pemetaan asset dan potensi, analisis ekonomi, dan perencanaan aksi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan observasi pada lingkungan RPTRA Meruya Selatan diketahui

terdapat beberapa fasilitas yang belum terawat dengan maksimal, di antaranya adalah kolam ikan, lahan penghijauan, dan media komposting. Lahan penghijauan yang tidak produktif, tanaman sayur vertikultur yang tidak terawat dengan baik dan tanaman labu madu dengan metode konvensional yang mengalami gagal panen dan tidak ada pemanfaatan lahan lanjutan. Keberadaan ini sebagaimana gambaran temuan Ardiansyah (2024). Keterbatasan yang dihadapi RPTRA adalah adanya keterbatasan akses pendanaan (Ramadhani dan Saputra, 2022) dan kreatifitas pengelola yang kurang (Ardiansyah, 2024).

Mengelola potensi yang ada merupakan langkah penting yang dapat diambil. Berangkat dari analisis situasi tersebut, para *stakeholder* berdiskusi untuk memetakan potensi yang ada. Proses identifikasi potensi atau asset ini merupakan tahap awal dalam konteks ABCD (Mathie & Cunningham, 2002). Aset *tangible* yang dimiliki oleh RPTRA adalah keberadaan lahan, sumber daya manusia (pengelola) dan masyarakat. Aset *intangible* berupa sistem dan dasar hukum yang menaungi kerja RPTRA, potensi pasar, dan dukungan masyarakat pengguna.

Lahan penghijauan dapat dimaksimalkan untuk produktifitas penghijauan dan pertanian yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Ketersediaan pengelola yang memperoleh tunjangan pengelolaan berupa honor dan atau gaji dari pemerintah daerah serta sistem kerja yang telah mapan, seperti pemberlakuan shift dan jam kerja. Pengelola adalah aset strategis yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan organisasi (Arghajata, 2025). Karenanya, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan perlu dilakukan. Masyarakat pengguna manfaat RPTRA merupakan eksistensi penting yang memberikan nilai pada peletakan fungsi dan tujuan KLA melalui program-program yang dilaksanakan di sana.

Identifikasi aset *intangible*, antara lain: *pertama*, RPTRA yang dinaungi oleh peraturan pemerintah daerah dan atau provinsi yang jelas (Reza & Maullana, 2022). Ketentuan hukum ini mengatur, seperti keberadaan dan kepemilikan lahan, sumber dana pengelolaan, sistem dan tata cara pengelolaan serta pengembangan. *Kedua*, adalah potensi pasar. Permasalahan RPTRA salah satunya adalah masalah keterbatasan pendanaan (Ramadhani dan Saputra, 2022). Orientasi dan ide terkait pemberdayaan

ekonomi menjadi wacana, dimana pasar memiliki peran krusial (Indana & Beni, 2021). Ketiga, potensi berupa dukungan masyarakat. Pemanfaatan RPTRA secara intensif oleh warga untuk berbagai kegiatan dapat memunculkan kepentingan dan dukungan yang berarti dari warga.

Kajian ketiga dari tahapan perencanaan adalah membahas mengenai visi (*dream*). Dalam diskusi kelompok, Pak Lurah menyatakan bahwa:

“Di sini kita memiliki fasilitas komposting, kolam ikan, kemarin juga sempat nanem labu madu, yang sebenarnya ini jadi program unggulan kita, tapi tidak tahu ini masalahnya apa, tidak bisa tumbuh dan mati. Tiga fasilitas ini yang perlu diperhatikan, kalau mau membuat komposting ya bisa diproduksi lagi, karena bak komposnya sudah disiapkan. Kalau kolam ikan, banyak yang suka ngambilin, belum sempat besar sudah pada ilang ikannya”. (13 Januari 2025, RPTRA Meruya Selatan)

Beberapa gagasan dilontarkan dalam diskusi kelompok. Fokus utama pemecahan masalah pada RPTRA Meruya Selatan adalah bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara lebih maksimal, utamanya pada tiga fasilitas yang disebutkan Pak Lurah, sebagai representatif utama mitra. Beberapa gagasan antara lain budidaya ikan metode RAS, komposting metode aerob, dan hidroponik.

Berdasarkan gagasan dan harapan yang disampaikan dalam diskusi kelompok, tim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan perencanaan aksi (*design*). Pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah masalah jangkauan biaya pelaksanaan aksi dan ketrampilan pengelolaan. RPTRA Meruya Selatan diketahui berada pada masa transisi kepengurusan. Formasi kepengurusan dibentuk dengan pertimbangan bagaimana meningkatkan keaktifan RPTRA. Koordinator RPTRA transisi menyatakan sebagai berikut:

“Memanfaatkan lahan ini gakpapa dibuat hidroponik, kemarin ditanamin labu madu juga gak bisa panen, gak mau tumbuh... yang ini (yang dimaksud vertikultur) tidak dirawat dengan baik sama pengurus sebelumnya, gak tahu juga saya.. sebelumnya di Manunggal (sebelumnya beliau koordinator RPTRA

Manunggal) saya yang merawat hidroponik, saya suka posting-posting di tiktok, di facebook, akhirnya ada orang-orang yang hubungin.. termasuk mahasiswa universitas mana itu minta diajarin.. mereka sekarang bisa jualan, masuk supermarket karena punya koneksi, sekarang sudah rutin produksi terus. Kalau di sini, kita jualnya masih jual ke warga aja”. (13 Januari 2025, RPTRA Meruya Selatan)

Berdasarkan diskusi bersama para stakeholder dan observasi lapangan, rencana aksi disusun dengan prioritas ketersediaan dana dan kemampuan keberlanjutan program. Kemampuan keberlanjutan dinilai tim berdasarkan pengalaman, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelola dalam menjalankan program. Seperti pernyataan koordinator RPTRA, bahwa beliau memiliki pengalaman yang cukup bagus dalam budidaya hidroponik.

Sebagai metode *urban farming* yang mengedepankan juga masalah estetika dan memanfaatkan keterbatasan lahan, hidroponik lebih memiliki keunggulan dibandingkan vertikultur. Vertikultur berbasis media tanah, sebagaimana metode tradisional, namun cara menanamnya dalam wadah yang dapat disusun secara bertingkat, pertimbangan utamanya adalah pada pemanfaatan lahan terbatas (Hidayatulloh, *et all.*, 2022). Konsep ini sama dengan hidroponik, namun media tanamnya berbeda. Keunggulan hidroponik adalah lebih efisien nutrisi, produktifitas lebih tinggi, hemat air karena menggunakan sistem sirkulasi, lebih mudah mengontrol hama sehingga dapat mengurangi penggunaan pestisida (Siregar, 2021).

Peningkatan kapasitas pengelola dalam hal pemahaman keuangan juga dipertimbangkan dalam usaha menjaga keberlanjutan program. Pemahaman penghitungan biaya produksi dan harga jual merupakan tema penting yang dipertimbangkan. Pemahaman perhitungan ini bermanfaat untuk menghindari terjadinya kerugian. Kesalahan umum yang sering dijumpai pada pemula adalah mengalokasikan biaya secara salah, sehingga tidak mengetahui berapa biaya produksi yang sebenarnya, seperti misalnya tidak menghitung biaya tersembunyi, seperti listrik atau tenaga kerja. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan harga jual (Hongren *et all.*, 2017). Warga sebagai calon pasar juga perlu

diberikan edukasi mengenai penentuan harga jual, sehingga dapat memahami konsep harga yang harus dibayarkan pada saat membeli produk hidroponik.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan observasi lapangan, kemudian disusun rencana aksi konkret. Agenda disusun ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu penyediaan fasilitas hidroponik; *kedua*, pelatihan budidaya hidroponik serta perhitungan biaya produksi dan harga jual; *ketiga*, monitoring dan evaluasi. Ringkasan agenda dan pelaksanaan aksi dirinci dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan
1	6 & 13 Januari 2025	Persiapan awal, diskusi kelompok, dan observasi lapangan
2	9 Mei 2025	Set up peralatan hidroponik
3	13 & 14 Mei 2025	Pendampingan awal dan pembibitan
4	16 Mei 2025	Pelaksanaan pelatihan
5	2 Juni 2025	Pemantauan progress lapangan
6	13 Juni 2025	Pemanenan pertama dan pengemasan produk
7	Juni - Agustus	Evaluasi dan pendampingan

Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan *define/deliver* dilakukan sesuai dengan rencana aksi dan penyesuaian lapangan, seperti salah satunya adalah kelambatan masa panen, karena situasi hujan yang terus menerus. Membuat munculnya beberapa penyakit daun dan menghambat pertumbuhan. *Set up* peralatan dilakukan oleh pengelola dan tim PKM, terutama mahasiswa (Gambar 1).



Gambar 1. Set-up Peralatan Hidroponik

Setelah *set up* peralatan dan instalasi pengairan dilakukan, tim PKM melakukan pendampingan pembibitan dan pemindahan hasil semi (Gambar 2).



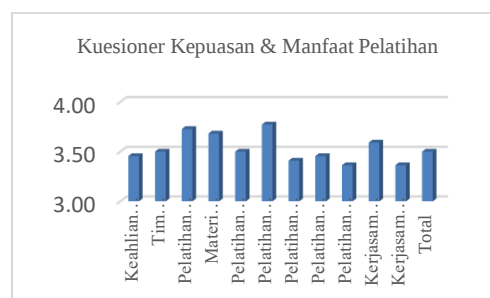
Gambar 2. Penyemaian dan Pemindahan Bibit

Pelaksanaan selanjutnya adalah pelatihan budidaya hidroponik dan penghitungan biaya produksi & harga jual yang diisi langsung oleh tim. Pelatihan dibuka oleh perwakilan dari Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas dan sambutan dari Lurah Kelurahan Meruya Selatan. Peserta yang diundang adalah warga masyarakat dan pengelola RPTRA (Gambar 3).



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Dalam kegiatan ini dievaluasi keterserapan dan kepuasan peserta atas materi yang disampaikan. Berikut ini disajikan grafik hasil pengolahan data survei peserta (Gambar 4).



Gambar 4. Survei Manfaat & Kepuasan Pelatihan

Hasil olah data grafik dapat dijelaskan, kompetensi dan efektifitas penyampaian materi dinilai secara rata-rata baik, yaitu mendapat *score* 3,47 pada skala likert 1-4. Manfaat pelatihan bagi masyarakat secara rata-rata mendapat *score* 3,67 yang berarti rata-rata masyarakat menyetujui bahwa materi dan pelatihan yang didapat memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan warga. Selain itu, hasil pelatihan dinilai dapat menambah produktifitas dan memberikan peluang peningkatan pendapatan, jika dorongan untuk mempraktikan dapat dilakukan. Secara rata-rata peserta memberikan *score* 3,45. Peningkatan kualitas ekonomi atau sosial dapat tercapai jika hasil pelatihan diimplementasi dengan baik mendapatkan *score* rata-rata 3,36. Di sisi lain, program kerjasama kemitraan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi target tujuan, jika kontinuitas program dapat dilakukan secara berkala. Secara rata-rata, peserta memberikan *score* 3,5, yang artinya beberapa peserta menyetujui dan sangat menyetujui program kerjasama ini.

Kegiatan pendampingan lanjutan, monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rentang waktu Juni – Agustus 2025. Pendampingan lanjutan pertama adalah pemantauan hasil dan mengidentifikasi kendala yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 (Gambar 5).



Gambar 5. Sayuran terhambat tumbuh karena kutu daun dan guyuran hujan terus-menerus.

Gambar di atas menunjukkan kendala yang dijumpai di lapangan, cuaca hujan yang terus menerus menyebabkan hama daun dan menghambat pertumbuhan sayuran.

Air hujan yang membasahi daun, dapat meningkatkan kelembaban daun, sehingga rentan terhadap berbagai macam penyakit (Qurrahman, 2019). Air hujan juga dapat mempengaruhi PH (keasaman) air yang menyalurkan nutrisi pada seluruh tanaman.

Terganggunya PH air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran hidroponik (Qurrahman, 2019). Yang ditemui pada tanaman RPTRA Meruya Selatan adalah hama daun (kutu air). Cara mengatasi dengan pemberian pestisida nabati (organik). Untuk mengatasi masalah ini, budidaya hidroponik lebih baik dilakukan di dalam *green house* atau minimal diberikan naungan, sehingga air hujan tidak secara langsung memapar tanaman (Qurrahman, 2019).

Tahapan pelaksanaan selanjutnya adalah pemanenan dan pengemasan (Gambar 6 dan 7). Desain logo dan kemasan disediakan oleh mahasiswa.



Gambar 6. Pemanenan



Gambar 7. Pengemasan

Dari 60 netpot hidroponik didapat 15 pak sayuran pakcoy siap jual. Distribusi dan penentuan harga jual serta pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pengelola.

Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dan evaluasi dilakukan berkala melalui komunikasi baik daring atau luring. Dalam tahapan ini, tim dan para *stakeholder* dapat mengetahui seberapa jauh keberlanjutan program dapat berjalan (*destiny*) ke depannya. Sampai bulan Agustus 2025, pengelola RPTRA telah melakukan panen sebanyak 3 kali dengan hasil yang lebih baik dari panen pertama. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dijumpai pada masa panen pertama telah dapat diperbaiki

dengan baik, mengingat kondisi cuaca hujan masih terus berlangsung (Gambar 8).



Gambar 8. Panen ketiga

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan ketrampilan pengelola dalam budidaya hidroponik, hal ini terbukti dari penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas hasil panen pasca panen pertama. Panen berkala dalam waktu 3 bulan selama 3 kali panen menunjukkan bahwa pengelola mampu memproduksi sayuran hidroponik sesuai dengan tenggat panen yang seharusnya, yaitu dalam waktu 25 – 40 hari dari pemindahan semai ke *netpot* dan media. Gambar 9 menggambarkan penjualan sayuran pada kelompok PKK setempat.



Gambar 9. Penjualan sayuran pada kelompok PKK setempat.

Jika rata-rata panen bisa menghasilkan 12.000 gram sayuran pokcoy dari 60 *hole* media dengan harga per seratus gram adalah Rp1.350,- terdapat pendapatan tambahan bagi RPTRA sebanyak Rp162.000,- per panen dalam masa panen rata-rata 30 hari. Dengan demikian, maka terdapat tiga peningkatan kapasitas yang didapat dari kegiatan ini, yaitu: peningkatan pengetahuan dan ketrampilan budidaya hidroponik serta penambahan pendapatan yang berkelanjutan bagi RPTRA. Selain itu, fasilitas RPTRA menjadi nampak lebih terawat, hijau dan asri, sehingga dapat menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan warga dan dapat mencapai tujuan KLA (Kota Layak Anak). Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan ini, dapat dijadikan pijakan rancangan untuk kegiatan selanjutnya, sehingga terjadi peningkatan yang lebih baik dari program berjalan sekarang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari semua tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada penggunaan metode ABCD (*Asset-Based Community Development*), diketahui bahwa terdapat peningkatan ketrampilan dan pengetahuan warga terkait budidaya hidroponik. Kedua, terdapat penambahan pendapatan dari penjualan hasil produksi sayuran hidroponik. Ketiga, terdapat peningkatan fasilitas dan pelayanan pada RPTRA yang dapat mendorong pencapaian tujuan RPTRA sebagai KLA. Peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan melalui penambahan kapasitas lahan atau media, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pendapatan secara lebih baik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti dan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan pendanaan pada Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini melalui LPPM periode 2024-2025.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, Reza & I., Maullana. 2022. 50 RPTRA di Jakarta Pusat Rusak Tidak Terawat sejak Pandemi. Kompas

- Megapolitan, 13 April 2022. Diakses pada 7 Januari 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/13/14313891/50-rptra-di-jakarta-pusat-rusak-karena-tidak-terawat-sejak-pandemi?utm>
- Alam, Ardiansyah. 2024. Provinsi DKI Jakarta Verlap Progres Perbaikan RPTRA Cambela Kamal. Sekkojakbar. 4 Oktober 2024. Diakses pada 7 Januari 2025. <https://barat.jakarta.go.id/berita/provinsi-dki-jakarta-verlap-progres-perbaikan-rptra-cambela-kamal?utm>
- Alfia, Y. D., & D., Yoshida. (2023). Perhitungan Manfaat Ekonomi Dan Penyusunan Harga Pokok Produksi Produk Eco Enzyme. Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Alfia, Y. D., Setiyawati, H., Suharmadi, S., Widyanto, M. L., Hadnan, M., Choiriah, S., Pratiwi, R., Surjandari, D. A., Marlina, R., Mubarakah, S., Utami, S. W., Rahayu, P., & Suroso, E. (2025). Mengembangkan Potensi Pondok Pesantren melalui Budidaya Ikan Metode RAS. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 16(1), 10.21070/ijccd.v16i1.1050. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1050>
- Arghajata. (2025). Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai Aset Strategis Perusahaan. Arghajata Consulting, diakses 20 Agustus 2025, <https://www.arghajata.com/id/insight/2025/03/sumber-daya-manusia/>
- Belekubun., R., A. 2023. Pembenahan Ruang Publik Ramah Anak Terbentur Birokrasi Anggaran. Kompas.id. 30 Januari 2023. Diakses pada 7 Januari 2025. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/01/30/fasilitas-di-sejumlah-rptra-jaksel-rusak-terkendala-birokrasi?utm>
- Falentia Tia Indana, & Beni, S. (2021). Strategi Pemasaran Sayuran Hidroponik Shanti Bhuana. Business, Economics Dan Entrepreneurship, Vol. 3, No. 2, hlm86–92. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v3i2.316>
- Gitman, L. F., & C., J., Zutter. (2015). Principles of Managerial Accounting. New York: Pearson Education.
- Herlina, Netti. (2018). Implementasi Kebijakan Ruang Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di RPTRA Utama Cengkareng Jakarta Barat. Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Vol. XIX, No. 1, hlm42-58, <http://doi.org/10.21009/PLPB.191.03>
- Hidayatulloh, M. K. Y., *et all.* (2022). Budidaya Tanaman Vertikultur Sebagai Upaya Pengoptimalan Ketahanan Pangan Rumah Tangga. JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia), 2(1), hlm29-37
- Hongren, C. T., S. M. Datar & M., Rajan. (2017). Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis (16th ed). Pearson Education.
- Indana, Falentia Tia & S., Beni. (2021). Strategi Pemasaran Sayuran Hidroponik Shanti Bhuana. Business, Economics and Entrepreneurship, 3(2), 86–92. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v3i2.316>
- Kurniawan, F. H., B., Santoso, A., Sobandi, M., A., Maulana, & G., D., Fitrina. (2024). Implementasi Asset Based Community Development: Strategi Peran Pemimpin dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis Circular Economic pada Unit Usaha Syariah. Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 9(1), hlm197-216, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2328>
- Mathie, Alison & G., Gunningham. (2002). From Clients to Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy for Community-Driven Development. Occasional Paper Series, No. 4, Januari 2002, Canada: Coady International Institute
- Putra, Agung. & H. Yulianto. (2015). Soilless Culture System to Support Water Use Efficiency and Product Quality: a Review. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3(2015), pp.283-288,

- <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.01.054>
- Qurrohman, B., F., T. (2019). Bertanam Selada Hidroponik Konsep Dan Aplikasi: Konsep & Aplikasi. Bandung: Pusat Penelitian & Penerbitan UIN SGD.
- Qurrohman, B., F., T. (2019). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sistem Pertanian Organik & Hidroponik Berbasis Komunitas, Bandung: Pusat Penelitian & Penerbitan UIN SGD.
- Ramadhani, Y., dan A., Saputra. (2022). Pemberdayaan Komunitas Rumah Baca Cendekia Dengan Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) Guna Meningkatkan Minat Baca Pada Anak. Lokomotif Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(1), hlm1-10, <https://doi.org/10.30631/lokomotifabdima.s.v1i1.1528>
- Reza, A., P., & A. Kurniadi. (2024). Problematika Pengelolaan RPTRA di Cakung Barat. Jurnal Perspektif: Kajian Kepemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Vol.5, No. 5, hlm55-65.
- Setiany, Erna., *et all.* (2023). Peningkatan Perekonomian Keluarga Urban Melalui Budidaya Sayur Hidroponik. Jurnal Abdi Masyarakat, Vol. 9, No.1. hlm1-9. <http://dx.doi.org/10.22441/jam.v9i1.23529>
- Setiany, Erna., *et all.* (2024). Entrepreneurial Empowerment Through Hydroponic Cultivation In South Meruya. The 6th International Conference and Community Development (ICCD) 2024 “Advancing Eco-Friendly and Zero Waste Initiatives”, hlm28-35.
- Siregar, M. H. F. F., & A. Novita. (2021). Sosialisasi Budidaya Sistem Tanam Hidroponik dan Veltikultur. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), hlm113-117, <https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i1.6826.g5480>
- Sukmawani, R., E. T., Endang, A. N., Milla, & N. K., Rini. (2023). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani Milenial. Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 7(1), hlm.26-33, <https://doi.org/10.25077/logista.7.1.26-33.2023>
- Sururi, A., *et all.* (2020). Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kawasan Pantai Utara Desa Domas Kabupaten Serang. Kumawula, Vol. 3, No.3, Desember 2020, hlm405 – 415, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.27286>
- Zunaidi, A. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat. Pendekatan Praktis Untuk Memberdayakan Komunitas. Bekasi: Yayasan Putra Adi Dharma.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.